

EVALUASI KEMITRAAN KONSERVASI DAN KETERCAPAIAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA GAPOKTANHUT SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI, TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

(Skripsi)

Oleh

Nafisa Hidayatul Fitri

NPM 2016021022



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

EVALUASI KEMITRAAN KONSERVASI DAN KETERCAPAIAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA GAPOKTANHUT SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI, TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

Oleh

Nafisa Hidayatul Fitri

Kelestarian hutan adalah salah satu objek yang terancam saat ini karena kurangnya kepedulian masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat Permen LHK No. 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, yang juga membahas kemitraan konservasi. SHK Lestari merupakan salah satu gapoktanhut yang menjalin kemitraan dengan Tahura WAR. Sejak tahun 2002 SHK Lestari yang didampingi oleh Tahura WAR dan LSM Walhi Lampung untuk mendapatkan Perjanjian Kerjasama dari KLHK namun sampai saat ini masih belum tercapai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan, implementasi, serta monitoring evaluasi Kemitraan Konservasi serta melihat ketercapaian *Good Environmental Governance (GEG)* pada SHK Lestari. Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat uji analisis yang digunakan adalah SmartPLS dengan metode analisis SEM (*Structural Equation Modeling*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam evaluasi SHK Lestari, perencanaan, implementasi, serta monitoring evaluasi mendapat nilai dengan kategori baik, namun perlu peningkatan pada implementasi. Sedangkan ketercapaian GEG disimpulkan sudah cukup tercapai, namun perlu peningkatan pada indikator partisipasi dan representasi.

Kata Kunci: Evaluasi, Kemitraan Konservasi, *Good Environmental Governance*.

ABSTRACT

EVALUATION OF CONSERVATION PARTNERSHIP AND ACHIEVEMENT OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE IN GAPOKTANHUT LESTARI COMMUNITY FOREST SYSTEM, TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

By

Nafisa Hidayatul Fitri

Forest preservation is one of the objects that is currently threatened due to a lack of public awareness. Therefore, the government issued Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 concerning Social Forestry Management, which also discusses conservation partnerships. SHK Lestari is one of the gapoktanhuts that has a partnership with Tahura WAR. Since 2002, SHK Lestari has been accompanied by Tahura WAR and NGO Walhi Lampung to obtain a Cooperation Agreement from the Ministry of Environment and Forestry, but until now this has not been achieved. The aim of this research is to describe and analyze the planning, implementation and evaluation monitoring of the Conservation Partnership and to see the achievement of Good Environmental Governance (GEG) in SHK Lestari. The research method in this research is descriptive research with a quantitative approach. The analysis test tool used is SmartPLS with the SEM (Structural Equation Modeling) analysis method. The results of this research show that in the evaluation of SHK Lestari, planning, implementation and monitoring of the evaluation received a score in the good category, but implementation needs to be improved. Meanwhile, it was concluded that GEG's achievements were sufficient, but needed to be improved in terms of participation and representation indicator.

Keywords: *Evaluation, Conservation Partnership, Good Environmental Governance.*

EVALUASI KEMITRAAN KONSERVASI DAN KETERCAPAIAN *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE* PADA GAPOKTANHUT SISTEM HUTAN KERAKYATAN LESTARI, TAHURA WAN ABDUL RACHMAN

Oleh

Nafisa Hidayatul Fitri

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi : **Evaluasi Kemitraan Konservasi Dan Ketercapaian *Good Environmental Governance* Pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari, Tahura Wan Abdul Rachman**

Nama Mahasiswa : **Nafisa Hidayatul Fitri**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016021022**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.
NIP. 196405081993031004

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

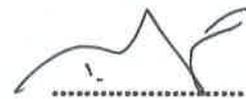


Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.
NIP. 196112181989021001

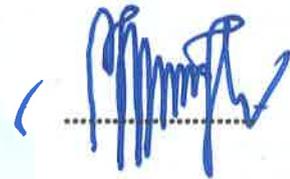
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si.



Penguji 1 : Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos., M.IP.



Penguji 2 : Eny Puspasari, S.Hut., M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 07 Mei 2024

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 April 2024



Nafisa Hidayatul Fitri
NPM. 2016021022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Nafisa Hidayatul Fitri, lahir di Purwosari, Kabupaten Pringsewu pada tanggal 16 Desember 2001. Penulis adalah puteri dari pasangan Bapak Amin Musrianto dan Ibu Sari Eka Wati dan merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang memiliki kakak bernama Pingka Aldia Saputri.

Sebelum menyelesaikan masa pendidikan di jenjang sarjana, penulis telah menyelesaikan pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Tegalsari Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2017 dan terakhir melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2020.

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Kemudian pada tahun 2023, penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Hantatai Kabupaten Lampung Barat selama 40 hari serta mengikuti kegiatan Magang Kampus Merdeka di Wahana Lingkungan Hidup Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif pada organisasi kampus yaitu Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Kepala Divisi Kaderisasi, Paduan Suara Mahasiswa FISIP sebagai anggota, dan organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan sebagai anggota.

MOTTO

“Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak (pula) membencimu”

(QS Ad-Dhuha ayat 3)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS Al-Insyirah ayat 5-6)

“Allah timing are perfect, sabr”

(Instagram Islamiclife25)

“Like the sun pushing the dark, spirit and shine”

(Film It's Okay, That's Love)

“Keep it going and let it flow”

(Nafisa Hidayatul Fitri)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah Nya.

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Kupersembahkan karya tulis ku ini, Untuk orang-orang yang kusayangi dan menyayangiku :

Ayah dan Ibuku tercinta,

Yang selalu mendoakan serta memberikan kasih sayang, dukungan, pengorbanan yang tiada habisnya untukku.

Kakakku dan saudara-saudaraku tersayang,

Yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi untukku.

Sahabat-sahabatku,

Yang selama ini selalu berada di sampingku, memberikan banyak kekuatan Dan memberikan warna dalam perjalanan hidupku.

Para Pendidik,

Yang telah memberikan bekal ilmu serta dukungan dan doa.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT serta berkat doa dan restu dari orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Kemitraan Konservasi dan Ketercapaian Good Environmental Governance Pada Gapoktanhut Sistem Hutan kerakyatan Lestari, Tahura Wan Abdul Rachman”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerjasama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si. selaku dosen pembimbing. Terima kasih untuk ilmu, waktu, nasihat, saran serta kesabaran yang diberikan kepada penulis yang senantiasa memberikan pengarahan dan masukan serta motivasi selama masa penyusunan skripsi ini. Semoga segala keikhlasan dan ketulusan Bapak dalam membimbing saya selama ini membawa keberkahan.
4. Ibu Eny Puspasari, S.Hut, M.Si. selaku Kepala UPTD Tahura WAR dan dosen penguji atau pembahas atas kesediaannya memberikan arahan dan perhatian kepada penulis. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.

5. Bapak Dr. Maulana Mukhlis, S.Sos. M.IP. selaku dosen penguji atau pembahas atas kesediaannya memberikan kritik dan saran kepada penulis. Semoga Bapak dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam segala hal.
6. Tim penelitian Explore CN050, Ibu Prof. Ir. Christine Wulandari, M.P, PhD. selaku ketua tim penelitian yang telah mengizinkan saya bergabung dan memberikan arahan dan perhatian terhadap penelitian ini. Serta anggota penelitian lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian dan saling memberikan semangat.
7. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis pada saat perkuliahan. Semoga dapat menjadi bekal dan bermanfaat dalam kehidupan penulis kedepannya.
8. Segenap responden penelitian yang telah meluangkan waktunya yakni Penyuluh kehutanan UPDT Tahura WAR, staf Walhi Lampung, serta seluruh anggota SHK Lestari. Semoga Bapak/Ibu diberikan kemudahan dalam setiap urusannya.
9. Kedua orang tuaku yang sangat penulis cintai dan hormati, terima kasih atas segala sesuatu yang kalian berikan kepada penulis. Doa, dukungan, nasihat, dan kesabaran untuk mendidik penulis yang tiada henti. Terima kasih atas kasih sayang yang terus kalian berikan sejak penulis dilahirkan sampai saat ini dan juga seterusnya. Maaf untuk segala kesalahan penulis kepada Bapak dan Mama, insyaallah penulis akan terus berusaha untuk menjadi membanggakan, dan maaf karena belum bisa membalas kebaikan Bapak Mama. Terima kasih atas kasih sayang yang terus kalian berikan sejak penulis dilahirkan sampai saat ini dan juga seterusnya. Tiada balasan yang dapat menggantikan segalanya terkecuali Jannah untuk kalian.
10. Kakakku tercinta Pingka Aldia Saputri, terima kasih atas dukungan, kepercayaan, dan doa yang telah diberikan dari dulu sampai sekarang. Semoga kita bisa terus menjadi kebanggaan Bapak dan Mama.

11. Sepupu-sepupuku tersayang Mba Fira, Atu, Mas Ijun, Mba Muti, Mba Asa, Mba Naja, Mba Anti, Ais, Pia, Alin, Jihan, Nopal, Paji, Dana, Lupi, Mba Reti, Mba Nadia, Firda, dan Nabil. Terimakasih telah menghibur, mendukung, dan menjadi tempat pulang penulis sejak kecil hingga sekarang.
12. Member WS Club, Reysia Yolia Putri dan Desi Maharani Nathaniela. Terima kasih karena telah memberikan warna dalam dunia perkuliahan penulis serta bersedia selalu bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini. Semoga kita dapat terus bersahabat dan mencapai mimpi kita, Aamiin.
13. Keluarga Kabinet Abhinaya Kopma Unila, Shafa, Gavra, Lintang, Risa, Syahril, Kak Intan, Syifa, Nadinda, Fikri, dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua canda tawa, pelajaran dan pengalaman berharga, serta waktu yang telah dihabiskan bersama. Kenangan terbaik di dunia organisasi dengan kalian adalah yang terbaik. Terimakasih telah membuat dunia penulis ramai dan menyenangkan.
14. *My dorotheas*, Uchi, Jihan, Tiara, Alma. Terimakasih atas segala dukungan, bantuan, dan doanya. Terimakasih telah bertahan selama ini menjadi temanku mendengarkan curhatan dan keluh kesah penulis. Semoga kita terus bersama dan sukses bersama, Aamiin.
15. Teman-teman seperjuangan, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2020. Terima kasih telah sama berjuang dalam menggapai cita. Semoga kita semua dapat menjadi seorang yang sukses kelak, Aamiin.
16. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
17. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akan tetapi, sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 07 Mei 2024

Nafisa Hidayatul Fitri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Kegunaan Penelitian	11
a. Kegunaan Teoritis	12
b. Kegunaan Praktis.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Teori Evaluasi Kebijakan.....	13
2.2 Perhutanan Sosial	14
2.3 Teori <i>Good Environmental Governance (GEG)</i>	16
2.4 Teori Kebutuhan Maslow	18
2.5 Teori Motivasi McClelland	20
2.6 Kerangka Pikir	21
III. METODE PENELITIAN	24
3.1 Tipe Penelitian.....	24
3.2 Fokus Penelitian	24
3.3 Lokasi Penelitian	25

3.4	Definisi Konsep	25
3.5	Definisi Operasional	27
3.5.1	Variabel Eksogen.....	27
3.5.2	Variabel Mediasi.....	28
3.5.3	Variabel Endogen	29
3.6	Populasi dan Sampel Penelitian	29
3.6.1	Populasi Penelitian	29
3.6.2	Sampel Penelitian	30
3.7	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	31
3.7.1	Data Primer	31
3.7.2	Data Sekunder	32
3.8	Teknik Analisis Data	33
IV.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
4.1	Gambaran Umum Sistem Hutan Kerakyatan Lestari	48
4.1.1	Sejarah dan Visi Misi Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari.....	48
4.1.2	Letak Geografis SHK Lestari.....	49
4.1.3	Kondisi Sosial Ekonomi Budaya	51
4.2	Pengumpulan Data.....	52
4.3	Analisis Deskriptif Variabel.....	52
4.3.1	Analisis Deskriptif Variabel Kebijakan.....	53
4.3.2	Analisis Deskriptif Variabel <i>Good Environmental Governance</i>	55
4.3.3	Analisis Deskriptif Variabel Motivasi & Kebutuhan	57
4.3.4	Analisis Deskriptif Variabel Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	58
4.3.5	Analisis Deskriptif Variabel Evaluasi SHK Lestari.....	59
4.4	Analisis Data Hasil Penelitian.....	61
4.4.1	Analisis <i>Outer Model</i>	62

4.4.2 Analisis <i>Inner Model</i>	69
4.4.3 Uji Hipotesis	71
4.4.4 Pengujian Efek Mediasi.....	75
4.4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	80
V. KESIMPULAN DAN SARAN	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	89

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Garapan KTH Gapoktanhut SHK Lestari	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	7
Tabel 3. Jumlah Anggota Gapoktanhut SHK Lestari	29
Tabel 4. Data Dokumen Penelitian	33
Tabel 5. Faktor Kebijakan.....	34
Tabel 6. Faktor <i>Good Environmental Governance</i>	35
Tabel 7. Faktor Motivasi dan Kebutuhan.....	39
Tabel 8. Luas Garapan KTH Gapoktanhut SHK Lestari	50
Tabel 9. Tingkat Pengembalian Kuesioner	52
Tabel 10. Analisis Deskriptif Variabel Kebijakan.....	53
Tabel 11. Analisis Deskriptif Variabel GEG.....	55
Tabel 12. Analisis Deskriptif Variabel Motivasi & Kebutuhan	57
Tabel 13. Analisis Deskriptif Variabel Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	58
Tabel 14. Analisis Deskriptif Variabel Evaluasi SHK Lestari.....	60
Tabel 15. <i>Loading Factor</i>	62
Tabel 16. <i>Loading Factor</i> Pengolahan Data 2	64
Tabel 17. Fornell-Larcker <i>Criterion Discriminant Validity</i>	66
Tabel 18. Nilai <i>Cross Loading</i>	67
Tabel 19. Nilai <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	68
Tabel 20. Nilai <i>Cronbach's Alpha & Composite Reliability</i>	68
Tabel 21. Nilai <i>Model Fit</i>	69
Tabel 22. Nilai <i>R Square</i>	70

Tabel 23. Nilai <i>Path Coefficient</i>	72
Tabel 24. Efek Mediasi Tahap Pertama	75
Tabel 25. Efek Mediasi Tahap Kedua.....	76
Tabel 26. Efek Mediasi Tahap Ketiga	78
Tabel 27. <i>Specific Indirect Effects</i>	79

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow	19
Gambar 2. Kerangka Pikir.....	23
Gambar 3. Hasil Pengolahan Data Tahap 1	61
Gambar 4. Hasil Pengolahan Data Tahap 2	64
Gambar 5. Hasil Pengujian Hipotesis	71

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Pengambilan Data Penelitian
- Lampiran 2. Kuesioner
- Lampiran 3. Data Running Kuesioner
- Lampiran 4. Hasil Running Data
- Lampiran 5. Hasil Analisa Outer Model
- Lampiran 6. Hasil Analisis Inner Model
- Lampiran 7. Dokumentasi Izin Turun Lapang Di Kelurahan Desa Cilimus
- Lampiran 8. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner Pada Anggota SHK Lestari
- Lampiran 9. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner Pada Kepala dan Koordinator
Penyuluh Kehutanan Tahura WAR
- Lampiran 10. Dokumentasi Penyebaran Kuesioner Pada Staf Walhi Lampung
- Lampiran 11. Dokumentasi Kegiatan Refleksi Rapat Tahunan SHK Lestari
- Lampiran 12. Berita Acara Verifikasi dan Penilaian Permohonan Kemitraan
Konservasi
- Lampiran 13. Data Anggota KTH Gapoktanhut SHK Lestari
- Lampiran 14. Rancangan Rencana Pelaksanaan Kerja SHK Lestari (KTH Karya
Makmur I)
- Lampiran 15. Rancangan Rencana Kerja Tahunan (RKK) SHK Lestari (KTH Karya
Makmur I)
- Lampiran 16. Peta Wilayah Kelompok Tani Tahura Wan Abdul Rachman

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kelestarian hutan adalah salah satu objek yang terancam saat ini. Hutan merupakan penghasil sumber daya alam yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya. Kepedulian masyarakat terhadap kelestarian sumber daya alam saat ini harus dipupuk dan dibangun demi keberlangsungan hidup di masa depan. Saat ini telah banyak terjadi eksploitasi hutan yang dilakukan masyarakat seperti penebangan liar, pembukaan hutan, industrialisasi, hingga perusakan hutan. Terlebih hutan konservasi yang merupakan hutan yang dilindungi undang-undang dalam menjaga kelestariannya juga tidak luput dari kerusakan.

Hutan konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu pada setiap daerah masing-masing dengan keanekaragaman flora dan fauna yang masih asli di ekosistemnya (Safe'i dkk., 2020:2). Hutan konservasi yang berupa cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, dan taman buru pengelolaannya dibawah pemerintah pusat yang dalam hal ini kementerian kehutanan melalui unit pelaksana teknis yang tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan hutan konservasi yang berbentuk taman hutan raya berada dibawah pemerintah daerah (Akhmaddhian, 2013:2).

Luasnya hutan yang dimiliki oleh Indonesia membuat banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan hidupnya pada hutan,

sehingga mereka yang akhirnya membuka lahan hutan dan menjadikannya sebagai lahan perkebunan dan pemukiman. Keadaan ini akhirnya mempengaruhi kelestarian hutan yang keberadaannya diperuntukan sebagai area konservasi dan terjaganya keseimbangan ekosistem yang dilindungi pemerintah seperti halnya hutan lindung dan hutan konservasi. Namun selain menjaga kelestarian hutan, disisi lain pemerintah juga harus memperhatikan kehidupan masyarakat yang bermukim di sekitaran areal hutan.

Persoalan kelestarian hutan yang kolektif membutuhkan partisipasi seluruh komponen bangsa untuk mengurus dan mengelolanya. Pemerintah, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komponen bangsa lain yang memiliki kemauan untuk bersama-sama menjaga kelestarian hidup dari ulah tangan jahil para preman dan penjahat lingkungan. Hal tersebut juga perlu dibarengi dengan tindak tegas hukum yang mengatur terkait lingkungan dan pelaku yang melanggarnya (Mukhlis, 2021:210).

Dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tentang Perhutanan Sosial yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, dimana menunjuk masyarakat sebagai aktor utama dalam meningkatkan kesejahteraannya serta menjaga keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya, yang dituangkan dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Taman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, Dan Kemitraan Kehutanan atau Konservasi.

Kemitraan Konservasi bertujuan untuk melindungi alam juga mengendepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kemitraan Konservasi sendiri dalam P.06/KSDAE/2018

tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020:189). Menurut Hartoyo dkk dalam Mufidah (2022:10) Tahura merupakan kawasan yang memiliki persoalan kompleks multistakeholder dimana bukan saja permasalahan konflik tenurial yang menjadi permasalahan namun juga konflik kepentingan dengan motif ekonomi juga menjadi permasalahan di kawasan ini. Tahura sedang mengalami pengembangan dan pembangunan. Kondisi Tahura saat ini terdapat berbagai macam kerusakan alam yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pengelolaan yang berbasis kemitraan menjadi solusi. (Mufidah, 2022:11).

Provinsi Lampung memiliki kawasan hutan seluas 1.004.735 ha, yang secara fungsi terbagi menjadi 3 jenis kawasan, antara lain Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Produksi. Di dalam Kawasan Hutan Konservasi terdapat Taman Hutan Raya (Tahura) di Register 19 Gunung Betung, seluas 22.244 ha yang secara administrasi wilayah berada di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran yang dinamakan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman (Tahura WAR).

Tahura WAR memiliki kemitraan konservasi hutan kerakyatan yang dicanangkan kementerian perhutanan. Penerapan Kemitraan Konservasi di Tahura WAR berjalan dengan baik dibuktikan dengan progres yang terus meningkat. Total KTH adalah 180 KTH dengan jumlah KTH yang sudah melakukan penandatanganan PKS sebanyak 17 KTH yang terbagi dalam dua Gapoktan yaitu 10 KTH dari Gapoktan Manunggal Sejahtera dan 7 KTH dari Gapoktan SHK Pesawaran Bina Lestari.

SHK Lestari sendiri merupakan salah satu gapoktan terlama yang sudah bermitra dengan Tahura namun pengajuan Kerjasama yang ditandatangani Kementerian LHK sampai saat ini masih belum tercapai. Pengajuan izin sudah dilakukan namun masih belum mencapai titik terang mengenai legalitas izin pengelolaan SHK Lestari.

Gapoktanhut SHK Lestari yang terdiri dari 21 Kelompok Tani Hutan (KTH) dengan luas Garapan sebagai berikut:

Tabel 1. Luas Garapan KTH Gapoktanhut SHK Lestari

No.	Kelompok Tani Hutan	Luas Garapan (Hektar)
1.	Karya Makmur I	32,241
2.	Karya Makmur II	35,743
3.	Karya Makmur III	31,165
4.	Karya Makmur IV	33,548
5.	Karya Mukti I	40,690
6.	Karya Mukti II	48,178
7.	Karya Mukti III	36,475
8.	Karya Mukti IV	35,246
9.	Karya Mukti V	40,423
10.	Karya Sejati	58,794
11.	Karya Tani I	53,32
12.	Karya Tani II	50,70
13.	Karya Tani III	26,18
14.	Sri Lestari I	28,75
15.	Sri Lestari II	43,85
16.	Puja Kesuma I	40,07
17.	Puja Kesuma II	41,01
18.	Puja Kesuma III	33,91

No.	Kelompok Tani Hutan	Luas Garapan (Hektar)
19.	Tersenyum I	30,81
20.	Tersenyum II	36,54
21.	Tersenyum III	37,64
Jumlah		815,283

Sumber : Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Gapoktanhut SHK Lestari

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan Gapoktanhut SHK Lestari mayoritas bermata pencaharian sebagai petani kebun. Mata pencaharian masyarakat tersebut sangat bergantung pada kawasan dan telah terjadi secara turun temurun. Dampak aktivitas budidaya kebun campuran ini berpengaruh terhadap kondisi Tahura WAR dengan adanya beragam jenis tanaman masyarakat di dalam kawasan.

Berdasarkan yang tersebut dalam gambaran umum di RKT masing-masing KTH pada Gapoktanhut SHK Lestari, beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan di KTH Gapoktanhut SHK Lestari saat ini di antaranya adalah:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar kawasan mengenai fungsi dari kawasan konservasi disebabkan oleh kurang efektifnya strategi komunikasi yang dilakukan dan kurang tersosialisasikannya kerangka hukum mengenai fungsi kawasan hutan, khususnya mengenai kawasan pelestarian alam. Nilai kawasan konservasi yang memiliki keanekaragaman hayati saat ini belum mampu meniptakan kebanggaan di antara masyarakat lokal. Sebaliknya, mereka malah beranggapan bahwa kawasan konservasi merupakan hambatan bagi pembangunan karena tidak diizinkan mengeksplorasi hutannya.
2. Masyarakat yang melakukan penggarapan di dalam kawasan pada umumnya tidak memiliki lahan garapan di lahan marga dan sangat menggantungkan hidupnya pada lahan kawasan hutan, sementara hasil

pemungutan HHBK dari areal garap belum bisa mencukupi kebutuhan hidup layak dari petani.

Sejak tahun 2003, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung mendampingi Gapoktan SHK Lestari. Walhi Lampung membantu memperjuangkan perizinan kemitraan konservasi dengan KPHK Tahura WAR. Menurut Walhi Lampung, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola dan melestarikan kawasannya.

Hubungan antara LSM Walhi Lampung dengan Dinas Kehutanan yang dalam hal ini adalah UPTD Tahura WAR perlu mencapai *Good Environmental Governance (GEG)*. Hubungan antar ketiga komponen tersebut harus dalam posisi seimbang, sinergis dan saling mengawasi. GEG merupakan konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup.

Terdapat tujuh indikator dalam prinsip GEG (Addahlawi dkk., 2020:109), yaitu 1) Aturan hukum, yaitu cara dalam mengatur warga dengan hukum agar tidak sewenang-wenang dan dapat berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku. 2) Partisipasi dan representasi, yaitu partisipasi adalah keterlibatan komponen governance dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indera dengan menggunakan bahasa sendiri. 3) Akses terhadap informasi, yaitu akses informasi yang dapat digunakan untuk menerima ataupun memberikan informasi kepada publik. 4) Transparansi dan akuntabilitas, yaitu transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan yang disampaikan dengan jelas, nyata, dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban

dari sebuah instansi atau lembaga. 5) Desentralisasi, merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri. 6) Lembaga dan Institusi, yaitu organisasi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. 7) Akses untuk memperoleh keadilan, artinya perantara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan dan hak-hak yang harus diterima.

Selanjutnya penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan atau tolak ukur dalam menyelesaikan penelitian ini. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis dari segi konsep maupun teori. Berikut adalah penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai referensi.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
1.	Muhamad Romadhon Fadhillah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran (Skripsi)	Penelitian ini berfokus pada hasil pemberdayaan bagi masyarakat yaitu yang mensejahterakan masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada hasil implementasi kemitraan konservasi yang dibentuk bersama antara LSM Walhi Lampung dan Masyarakat yang disetujui oleh Pemerintah.
2.	Naila Izzah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2014	Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa	Penelitian ini membahas peran masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan kemasyarakatan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai peran Kerjasama antara masyarakat, LSM, dan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
		Hutan (Studi Kasus Di BKPH Klumo Bangsrikabupaten Jepara) (Jurnal)	Pemerintah.
3.	Salma Mufidah, Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (2022)	Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung (Skripsi)	Penelitian ini mengevaluasi kemitraan konsevasi di Tahura Wan Abdul Rachman sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengevaluasi mengenai peran kerjasama antara masyarakat, LSM, dan Pemerintah dalam melaksanakan kemitraan konservasi pada SHK Lestari.
4.	Rizki Sanjaya, Christine Wulandari, dan Susni Herwanti Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (2017)	Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat (Jurnal)	Penelitian ini mengevaluasi peran masyarakat pengurus gapoktan dalam pengelolaan hasil hutan kemasyarakatan, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengevaluasi mengenai peran kerjasama antara masyarakat, LSM, dan Pemerintah dalam melaksanakan kemitraan konservasi.
5.	Is Eka Herawati, Program Studi Agribisnis, Universitas Terbuka Serang (2017)	Strategi Pemberdayaan Kelompok Tani Sistem Hutan Kerakyatan (SHK) Lestari Kawasan Taman Hutan Raya Wan Abdurrahman-Hurun Kabupaten Pesawanan Lampung (Jurnal)	Penelitian ini mendeskripsikan, melihat kelemahan dan kekuatan serta menyusun strategi untuk SHK Lestari, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengevaluasi mengenai peran kerjasama antara masyarakat, LSM, dan Pemerintah dalam

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
			melaksanakan kemitraan konservasi.
6.	Meilia Suryani Juanda, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (2023)	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Tentang Program Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman) (Skripsi)	Penelitian ini membahas mengenai peran masyarakat terhadap pengelolaan hutan dan kelestariannya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengevaluasi mengenai peran kerjasama antara masyarakat, LSM, dan Pemerintah dalam melaksanakan kemitraan konservasi.
7.	Sarif Hidayat, Syaiful Anwar, dan Endang Dwi Purbajanti, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro Semarang (2015)	Evaluasi Kinerja Dan Strategi Pengembangan Lembaga Agribisnis pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Desa Kalimaro Kecamatan Kedung Jati Kabupaten Grobogan (Jurnal)	Penelitian ini mengevaluasi kinerja Lembaga agribisnis dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengevaluasi mengenai peran kerjasama antara masyarakat, LSM, dan Pemerintah dalam melaksanakan kemitraan konservasi.
8.	Vivery Okthalamo dan Doddy Aditya Iskandar, Universitas Gadjah Mada (2022)	Efektivitas Program Kemitraan Konservasi Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (Jurnal)	Penelitian ini menilai efektivitas kemitraan konservasi di TNBBS, , sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengevaluasi kemitraan konservasi oleh Tahura Wan Abdul Rachman
9.	Hanikka Wedya Prasetia, Dwi Sadono, Dwi Retno Hapsari, IPB Bogor (2023)	Dinamika Kelompok dan Kemitraan Konservasi Lembaga Masyarakat Desa Hutan Konservasi dalam Taman Nasional Meru Betiri (Jurnal)	Penelitian ini menganalisis dinamika kelompok, karakteristik individu, pendamping program kemitraan konservasi dan kohesivitas kelompok di Taman Nasional Meru Betiri, sedangkan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan Dengan Penelitian Ini
			penelitian yang dilakukan peneliti mengevaluasi kemitraan konservasi oleh Tahura Wan Abdul Rachman
10.	Pancar Adelin H, Jurusan Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (2023)	Persepsi Masyarakat terhadap Kemitraan Konservasi dalam Pengelolaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi di Desa Balerante Kabupaten Klaten (Skripsi)	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan konservasi di TNGM, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti mengevaluasi mengenai peran kerjasama antara masyarakat, LSM, dan Pemerintah dalam melaksanakan kemitraan konservasi. di Tahura Wan Abdul Rachman

Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2023

Berdasarkan observasi awal terkait rencana program Gapoktanhut SHK Lestari, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimanakah penyelenggaraan SHK Lestari mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring evaluasi. Untuk selanjutnya dapat diketahui terkait kekurangan dalam pelaksanaan dan yang seharusnya dilakukan guna memperbaiki dan mengembangkan Gapoktanhut SHK Lestari dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Untuk itu *Good Environmental Governance* bagi para pendamping Gapoktanhut SHK Lestari perlu ditingkatkan demi tercapainya tujuan utama yang tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kawasan hutan. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan mengangkat judul “**Evaluasi Kemitraan**

Konservasi Dan Ketercapaian Good Environmental Governance Pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari, Tahura Wan Abdul Rachman”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan, implementasi, serta monitoring evaluasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari?
2. Apakah *Good Environmental Governance* yang dilakukan oleh Tahura WAR dan Walhi Lampung dalam pelaksanaan Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari telah tercapai?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan, implementasi, serta monitoring evaluasi Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari.
2. Untuk mengetahui ketercapaian *Good Environmental Governance* yang dilakukan oleh Tahura WAR dan Walhi Lampung dalam dalam pelaksanaan Kemitraan Konservasi pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah dan sumbangan penelitian yang memberikan ilmu pengetahuan dalam bidang kebijakan publik.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi pemerintah, yaitu sebagai bentuk evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan Kemitraan Konservasi pada Gapoktan Sistem Hutan Kerakyatan Lestari khususnya dan secara umum pada KTH-KTH lainnya
2. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai karya ilmiah yang menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang perhutanan sosial.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Evaluasi Kebijakan

Evaluasi adalah kegiatan menilai apakah suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuannya atau belum. Menurut Nugroho (2009:535) kebijakan yang telah dibuat setelahnya harus terus diawasi dan tidak dilepas begitu saja. Pengawasan tersebut salah satunya dengan mekanisme evaluasi kebijakan. Evaluasi ditujukan untuk melihat seberapa efektif suatu kebijakan publik untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat antara ekspektasi dan realita.

Kebijakan menurut Agus Subianto (Subianto, 2020:5) dalam dalam telaah teori kebijakan publik, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Menurut Situmorang evaluasi kebijakan dilakukan untuk melihat penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut mencapai apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang dapat dilakukan pada tiap tahapan kebijakan. Tipe-tipe evaluasi menurut James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) terdapat 3 tipe yaitu:

- a) Evaluasi merupakan kegiatan fungsional yang dikatakan tidak kalah penting dengan kebijakan.

- b) Evaluasi berfokus pada kinerja suatu kebijakan, maka dari itu memilih kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya.
- c) Evaluasi kebijakan sistematis yang mengemukakan jawaban atas kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya yang digunakan dan keuntungan yang didapat, dan penerimaan keuntungan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan evaluasi oleh Agus Subianto yang mana menilai kinerja, dari perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Gapoktanhut SHK Lestari, serta melihat apakah tujuan dari dibentuknya Gapoktanhut SHK Lestari ini telah tercapai atau belum.

2.2 Perhutanan Sosial

Perhutanan sosial pertama kali disebutkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 Tahun 2016 yang merupakan upaya pengelolaan pelestarian hutan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat sebagai aktor utama. Permen LHK No. 83 Tahun 2016 tersebut kemudian disempurnakan dengan Peraturan Menteri LHK No. 9 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar Kawasan hutan serta keseimbangan lingkungan yaitu menjaga kelestarian hutan, dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Taman Rakyat, Hutan Adat, Dan Kemitraan Konservasi.

Bentuk perhutanan sosial terdapat lima (5) skema yang memiliki tujuan serupa namun berbeda dalam bentuknya, yaitu antara lain:

- 1) Hutan Desa (HD), adalah hutan negara yang dalam pengelolaannya diberikan kepada desa dan hasilnya diperuntukan untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kesejahteraan desa.

- 2) Hutan Kemasyarakatan (HKm), adalah hutan negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Hutan Tanaman Rakyat (HTR), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang menerapkan silvikultur dalam menjaga kelestarian sumber daya hutan dan dengan tujuan untuk memaksimalkan potensi dan kualitas hutan.
- 4) Hutan Adat, adalah hutan yang lokasinya berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
- 5) Kemitraan Konservasi, adalah kerjasama antara masyarakat yang tinggal di kawasan hutan dengan pemerintah untuk menjadi peserta kemitraan konservasi dalam pengelolaan hutan sebagai bentuk pemberdayaan.

Kemitraan Konservasi bertujuan untuk melindungi alam juga mengendepankan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan. Kemitraan Konservasi sendiri dalam P.06/KSDAE/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dimaknai sebagai kerja sama antara kepala unit pengelola kawasan atau pemegang izin pada kawasan konservasi dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling menghargai, saling percaya, dan saling menguntungkan (Prayitno, 2020:189). Ruang lingkup P.06/KSDAE/2018 dalam Pasal 3 meliputi; (a) Kemitraan Konservasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat, (b) Kemitraan Konservasi dalam rangka pemulihan ekosistem dan, (c) pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi.

Menurut Hartoyo dkk dalam Mufidah (2022:10) Tahura merupakan kawasan yang memiliki persoalan kompleks multistakeholder dimana bukan saja permasalahan konflik tenurial yang menjadi permasalahan namun juga konflik kepentingan dengan motif ekonomi juga menjadi permasalahan di kawasan ini. Tahura sedang mengalami pengembangan dan pembangunan. Kondisi

Tahura saat ini terdapat berbagai macam kerusakan alam yang terjadi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pengelolaan yang berbasis kemitraan menjadi solusi (Mufidah, 2022:11).

Program yang berada di ranah kehutanan diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berbasis keadilan merupakan salah satu program Perhutanan Sosial (Agusti dkk., 2020:301). Izin pengelolaan hutan merupakan jaminan legalitas hak pengelolaan untuk masyarakat, hal ini diharapkan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk mengelola hutan, memelihara, dan mengatasi lahan hutan dengan baik (Raharjo dkk., 2020:184). Perhutanan sosial ini merupakan suatu sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan untuk kawasan hutan negara atau hutan hak yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sebagai aktor utama untuk meningkatkan keseimbangan lingkungan (KLHK, 2018). Konsep perhutanan sosial dapat diterima dan menjadi inovasi dalam bidang ilmu kehutanan (Gunawan & Afriyanti, 2019:229).

2.3 Teori *Good Environmental Governance (GEG)*

Good Environmental Governance atau yang disingkat GEG merupakan konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *Good Environmental Governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (Nopyandri, 2016) dalam Addahlawi dkk (2019:108).

Sedangkan dalam *World Bank* menyatakan bahwa kegiatan *Good Enviromental Governance* adalah kegiatan yang tujuannya untuk keberhasilan penggunaan SDA secara *sustainable* dan menjaga kualitas lingkungan. Hal tersebut membutuhkan tranparansi sistem pada institusi lingkungan, keterlibatan masyarakat dalam membentuk kebijakan-kebijakan dan menerapkan program. Good Environmental Governance merupakan kerangka pengelolaan negara berasal dari hubungan dengan rakyat dalam mengelola lingkungan hidup (Addahlawi dkk., 2020:108).

Balbase dalam Addahlawi dkk (2020:109) mengatakan terdapat tujuh indikator dalam prinsip *Good Environmental Governance* (Addahlawi dkk., 2020:109), yaitu sebagai berikut:

1) Aturan hukum (*the rule of law*)

Aturan hukum yaitu cara dalam mengatur warga dengan hukum karena hukum adalah hal yang memiliki keluwesan dalam mengatur kehidupan masyarakat agar tidak sewenang-wenang. Aturan hukum ditujukan agar penegak hukum dan masyarakat dapat berlaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Partisipasi dan representasi (*participation and representation*)

Partisipasi adalah keterlibatan komponen governance dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Sedangkan representasi adalah pengungkapan kembali sebuah ide/gagasan dari yang telah ditangkap oleh indera dengan menggunakan bahasa sendiri.

3) Akses terhadap informasi (*acces to information*)

Akses terhadap informasi merupakan perantara yang dapat digunakan untuk menerima ataupun memberikan informasi kepada publik.

4) Tranparansi dan akuntabilitas (*transparency and accountability*)

Transparansi adalah sebuah informasi tentang laporan di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil keputusan yang disampaikan dengan

jas, nyata, dan tidak dibuat-buat. Sedangkan akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban dari sebuah instansi atau lembaga.

5) Desentralisasi (*decentralitation*)

Prinsip desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

6) Lembaga dan Institusi (*institutions and agencies*)

Lembaga dan institusi merupakan organisasi yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Lembaga yang dimaksud bisa lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.

7) Akses untuk memperoleh keadilan (*aces to justice*)

Artinya perantara yang digunakan untuk memperoleh kewenangan dan hak-hak yang harus diterima.

Melalui prinsip GEG, pelaksanaan Kerjasama antara Tahura WAR dan juga Walhi Lampung selaku pembina SHK Lestari akan lebih terorganisasi. Maka perlu dengan menyamakan substansi dan tujuan melalui prinsip GEG tersebut,

2.4 Teori Kebutuhan Maslow

Abraham Maslow memperkenalkan teori kebutuhan dalam buku *Hierarchy of Needs* dan menempati urutan ke 14 yang merupakan teori yang paling banyak dirujuk dalam teori penelitian. Maslow mengemukakan gagasannya yang berspektif pada humanistic, bahwa dalam setiap diri manusia memiliki dorongan alami guna perkembangan diri, dengan tujuan akhir hidup adalah mewujudkan potensi seseorang secara penuh (Dhaniswara dkk., 2023:5).

Teori Maslow yang juga disebut Hirarki Kebutuhan Manusia mengemukakan lima kebutuhan manusia yang dibedakan berdasarkan tingkat kepentingannya. Manusia umumnya berupaya untuk mencukupi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah yaitu kebutuhan fisiologis, lalu meningkat ke tingkat setelah

kebutuhan sebelumnya terpenuhi, begitu seterusnya hingga mencapai kebutuhan paling tinggi yaitu aktualisasi diri (Bari & Randy Hidayat, 2022:10).



Gambar 1. Teori Hirarki Kebutuhan Maslow

1) **Kebutuhan Fisiologis**

Kebutuhan fisiologis meliputi kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup antara lain : makanan, air, udara, rumah, pakaian, dan lain-lain.

2) **Kebutuhan Rasa Aman**

Rasa aman berada ditingkat kedua yang merupakan kebutuhan perlindungan akan fisik manusia. Perlindungan ini dibutuhkan agar manusia dapat hidup dengan nyaman dan nyaman.

3) **Kebutuhan Sosial**

Pada kebutuhan sosial manusia membutuhkan rasa memiliki dan dimiliki agar diterima oleh orang-orang disekitarnya. Ini berdasarkan bahwa perlunya manusia berhubungan dengan manusia lainnya.

4) **Kebutuhan Penghargaan (Ego)**

Ego setiap manusia memiliki rasa untuk dapat mencapai derajat yang lebih tinggi dari orang lain. Manusia akan berusaha mencapai prestasi, reputasi dan status yang diinginkannya.

5) **Kebutuhan Aktualisasi Diri**

Kebutuhan aktualisasi diri berdasarkan pada cita-cita seseorang untuk menjadikan dirinya yang terbaik sesuai dengan potensi dan kemahiran

yang dimilikinya. Setiap individu akan menunjukkan dirinya mampu dalam melakukan suatu hal tersebut.

Teori kebutuhan ini juga sangat relevan dengan masyarakat di sekitar Kawasan hutan yang memiliki kebutuhannya masing-masing. Dalam hal ini, masyarakat sekitar hutan yang notabene masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, rata-rata mereka masih dalam tahapan fisiologis. Masyarakat sangat bergantung pada hasil hutan sebagai pendapatannya yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yaitu makan.

2.5 Teori Motivasi McClelland

Teori motivasi oleh McClelland mengemukakan bahwa setiap orang dimotivasi oleh adanya keinginan akan kekuasaan (power), pencapaian (achievement), dan afiliasi (affiliation) yang mana tiap individu akan mendapatkan kombinasi dari ketiga motivasi tersebut dan memperlihatkan satu motivasi yang paling diinginkan. McClelland mendeskripsikan pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah kebutuhan penting yang dapat mendorong motivasi.

McClelland mengemukakan setiap pribadi memiliki cadangan kekuatan potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemauan atau dorongan motivasi individu yang didukung dengan situasi dan kondisi serta kesempatan yang ada. Dalam MindTools (2017) dalam (Salim, 2019:140) McClelland menyaranakan tiga karakteristik individu yang dilatarbelakangi oleh motivasi milik David McClelland, yaitu:

a. Kebutuhan Akan Prestasi (*Need for Achievement*)

Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan pencapaian memiliki karakteristik keinginannya yang kuat dalam menentukan dan mencapai tujuan, menerima *feedback* dengan baik untuk memperbaiki progress

dalam pencapaiannya, dan juga senang bekerja sama dengan orang lain yang memiliki motivasi pencapaian serupa.

b. **Kebutuhan Akan Kekuatan (*Need for Power*)**

Seseorang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan pengaruh, serta menjadi berpengaruh sehingga dapat mengendalikan orang lain. Individu seperti ini cenderung memiliki jiwa kompetisi yang tinggi, berusaha mendapat kemenangan dan pengakuan akan statusnya oleh orang lain.

c. **Kebutuhan Akan afiliasi (*Needs for Affiliation*)**

Seseorang yang memiliki motivasi tinggi untuk afiliasi cenderung ingin bekerja dalam kelompok, mengusahakan segala sesuatunya untuk kepentingan kelompok, ingin menjadi orang yang disukai dalam kelompok, tidak terlalu menyukai kompetisi tetapi lebih menyukai kolaborasi.

Pemerintah dalam penelitian ini yang merupakan tokoh penting yang perlu menunjang serta memberdayakan masyarakatnya perlu memiliki motivasi yang tinggi dalam membantu memberikan kebutuhan masyarakat yang dalam hal ini masyarakat sekitar Kawasan hutan yang masih berusaha keras dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya. Sudah sepatutnya pemerintah membantu mengusahakan kebutuhan dari masyarakat.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir digunakan sebagai bahan landasan dalam pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam sebuah penelitian. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap hal-hal yang menjadi objek permasalahan dan disusun berdasarkan latar belakang, tinjauan dan hasil penelitian yang relevan.

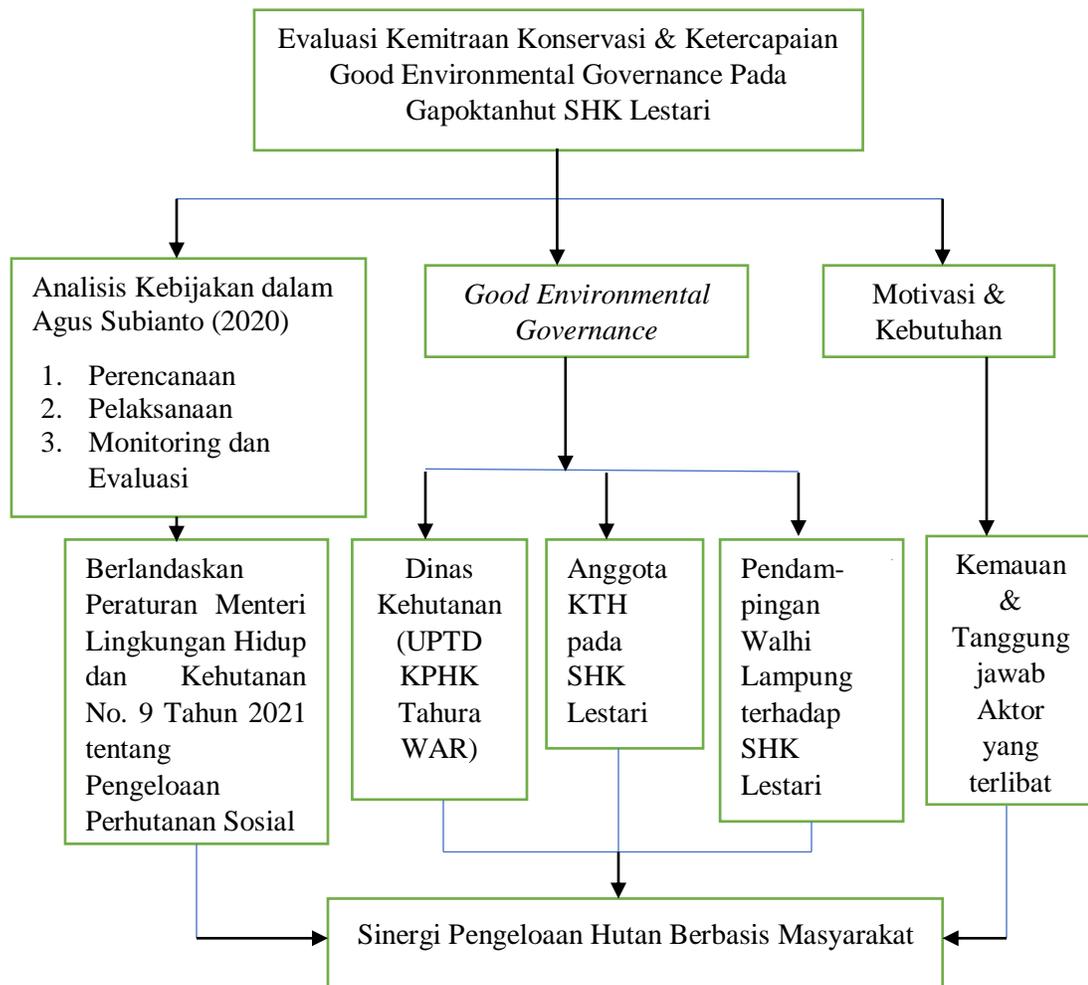
Dalam mengevaluasi kebijakan tentang program Sistem Hutan Kerakyatan Pesawaran Bina Lestari, hal yang perlu dikaji adalah yang pertama Peraturan

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dimana menunjuk masyarakat sebagai aktor utama dalam meningkatkan kesejahteraannya serta menjaga kelestarian hutan yang merupakan pokok peraturan dalam kemitraan konservasi.

Dalam pelaksanaan kemitraan konservasi SHK ini, aktor utama yang berperan adalah masyarakat itu sendiri. Namun selain masyarakat, terdapat peran dari pemerintah yang dalam hal ini adalah Dinas Kehutanan yang diwadahi dalam Tahura dan juga Walhi Lampung selaku pendamping dalam keorganisasian Gapoktanhut SHK Lestari ini. Untuk itu diperlukan adanya Kerjasama yang baik antara ketiga aktor tersebut dalam menjalankan program ini. Dalam hal ini ketiga aktor perlu untuk mengaplikasikan *Good Environmental Governance* untuk mencapai cita-cita bersama dan terwujudnya Kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan juga LSM Walhi Lampung.

Selain itu faktor motivasi & kebutuhan juga tak kalah penting dalam pelaksanaan SHK Lestari. Dengan adanya anggota yang memiliki kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan melahirkan kemauan yang besar dalam memperjuangkan SHK Lestari. Kemudian dari sisi pendamping yaitu Tahura WAR dan LSM Walhi Lampung serta anggota SHK Lestari, akan memiliki rasa tanggung jawab dalam mencapai tujuan bersama SHK Lestari.

Gambar 2. Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan melalui metode penelitian kuantitatif yang menjelaskan tentang objek penelitian yaitu Gapoktanhut SHK Lestari dengan mengevaluasi kemitraan konservasi yang telah dilakukan dalam Gapoktanhut SHK Lestari, serta melihat sinergi pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang dilakukan antara pemerintah, LSM Walhi, dan juga masyarakat dimana SHK Lestari merupakan salah satu Gapoktanhut terlama yang bermitra dengan Tahura dan Walhi namun belum mendapatkan perjanjian Kerjasama dari KLHK.

Adapun metode penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendapatkan informasi yang valid dan representatif dari sejumlah responden yang mewakili suatu populasi.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan dalam suatu permasalahan yang akan dibahas dan dikaji. Fokus penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaku dalam kemitraan konservasi pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Pesawaran Bina Lestari dengan menilai realisasi pelaksanaan Gapoktanhut SHK Lestari dan sinergi pengelolaan Gapoktanhut SHK Lestari antara pemerintah, LSM Walhi, dan juga masyarakat menggunakan teori kebijakan

menurut Agus Subianto (Subianto, 2020:5) dalam dalam telaah teori kebijakan publik, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu untuk menilai suatu kebijakan dapat melihat dari ketiga indikator tersebut.

3.3 Lokasi Penelitian

Dalam Moleong (2016:128) mendeskripsikan lokasi penelitian sebagai tempat peneliti melakukan penelitiannya dalam usaha mendapatkan data-data akurat yang dibutuhkan dalam penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat realitanya. Adapun lokasi penelitian ini adalah Kawasan Hutan Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

3.4 Definisi Konsep

Definisi konseptual adalah unsur penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak diteliti. Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikemukakan definisi konseptual dari masing-masing variabel, sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

2. *Good Environmental Governance (GEG)*

Good Environmental Governance atau yang disingkat GEG merupakan konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip *Good Environmental Governance* memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumber daya alam dan

lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

3. Motivasi & Kebutuhan

Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, atau keinginan manusia yang harus dipenuhi, demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Dengan adanya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang, maka akan mendorong motivasi seseorang itu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta mencapai suatu tujuan.

4. Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Sedangkan hutan berbasis masyarakat (hutan kemasyarakatan) adalah hutan negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan sebagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sinergi pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah bagaimana suatu pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat itu dilakukan dan seberapa optimal itu telah dilakukan.

5. Evaluasi SHK Lestari

Evaluasi adalah kegiatan menilai apakah suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuannya atau belum. Sedangkan SHK Lestari adalah sebuah gabungan kelompok tani hutan yang berkemitraan konservasi dengan Tahura WAR.

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variabel-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variabel-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang ber-sifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran (Ridha, 2017). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Variabel Eksogen

1. Kebijakan

Kebijakan menurut Agus Subianto (Subianto, 2020:5) dalam dalam telaah teori kebijakan publik, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu untuk menilai suatu kebijakan dapat melihat dari ketiga indikator tersebut.

2. *Good Environmental Governance (GEG)*

Good Environmental Governance atau yang disingkat GEG merupakan konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup. Balbase dalam Addahlawi dkk (2020:109) mengatakan terdapat 7 indikator GEG yaitu:

- 1) Aturan hukum
- 2) Partisipasi dan representasi
- 3) Akses terhadap informasi
- 4) Transparansi dan akuntabilitas
- 5) Desentralisasi
- 6) Lembaga dan institusi
- 7) Akses untuk memperoleh keadilan

3. Motivasi & Kebutuhan

McClelland mengemukakan setiap pribadi memiliki cadangan kekuatan potensial yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemauan atau dorongan motivasi individu yang didukung dengan situasi dan kondisi serta kesempatan yang ada. Sedangkan Maslow mengungkapkan manusia umumnya berupaya untuk mencukupi kebutuhan dari tingkatan yang paling rendah yaitu kebutuhan fisiologis, lalu meningkat ke tingkat setelah kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Maka dari itu diperlukannya kemauan yang kuat dan rasa tanggungjawab dalam rangka mencapai tujuan SHK Lestari.

3.5.2 Variabel Mediasi

1. Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Sinergi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan hutan dalam adalah bentuk kerjasama yaitu adanya pembagian peranan dan tanggungjawab secara seimbang, pemahaman yang searah dalam pengelolaan hutan, terbentuknya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang baik, maka masyarakat diposisikan sebagai pelaku utama, masyarakat diberi keleluasaan dalam mengelola hutan, fungsi hutan dapat terjaga kelestariaannya, mempertahankan musyawarah dan gotong royong sebagai nilai kearifan budaya lokal masyarakat dan secara ekonomi masyarakat mendapatkan porsi yang lebih besar untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Tjahjono, 2021:108). Oleh karena itu indikator sinergi pengelolaan hutan masyarakat adalah :

- 1) Terlaksananya program
- 2) Kerja sama yang baik
- 3) Menciptakan hasil yang baik

3.5.3 Variabel Endogen

1. Evaluasi SHK Lestari

Evaluasi adalah kegiatan menilai apakah suatu kebijakan atau program telah mencapai tujuannya atau belum. Menurut Nugroho (2009:535) kebijakan yang telah dibuat setelahnya harus terus diawasi dan tidak dilepas begitu saja. Pengawasan tersebut salah satunya dengan mekanisme evaluasi kebijakan. Evaluasi ditujukan untuk melihat seberapa efektif suatu kebijakan publik untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Evaluasi diperlukan untuk melihat antara ekspektasi dan realita. Indikatornya adalah sebagai berikut.

- 1) Kinerja pelaksana kebijakan
- 2) Selarasnya perencanaan dan implementasi
- 3) Tercapainya tujuan

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian

3.6.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota SHK Lestari dari seluruh Kelompok Tani Hutan, perwakilan dari Tahura WAR, dan Walhi Lampung. Adapun jumlah anggota Gapoktanhut SHK Lestari adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Anggota *Gapoktanhut* SHK Lestari

No.	Kelompok Tani Hutan	Jumlah Anggota (Orang)
1.	Karya Makmur I	27
2.	Karya Makmur II	28
3.	Karya Makmur III	24
4.	Karya Makmur IV	23

No.	Kelompok Tani Hutan	Jumlah Anggota (Orang)
5.	Karya Mukti I	26
6.	Karya Mukti II	30
7.	Karya Mukti III	24
8.	Karya Mukti IV	19
9.	Karya Mukti V	26
10.	Karya Sejati	32
11.	Karya Tani I	36
12.	Karya Tani II	33
13.	Karya Tani III	17
14.	Sri Lestari I	17
15.	Sri Lestari II	23
16.	Puja Kesuma I	22
17.	Puja Kesuma II	21
18.	Puja Kesuma III	20
19.	Tersenyum I	21
20.	Tersenyum II	22
21.	Tersenyum III	21
Jumlah		512

Berdasarkan tabel di atas, jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 512 orang.

3.6.2 Sampel Penelitian

Sampel dibutuhkan untuk mendapatkan data penelitian yang representatif, maka dalam penelitian ini dibutuhkan teknik pengambilan sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah populasi, yang memiliki kesesuaian akan karakteristik tertentu.

Dalam penelitian ini, penarikan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling*. Purposive sampling merupakan penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu atau pengambilan sampel dengan tujuan tertentu (Lenaini, 2021).

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = batasan kesalahan (error)

$$n = \frac{512}{1 + 512 (0,1^2)}$$

$$n = \frac{512}{1 + 512 (0,01)}$$

$$n = \frac{512}{1 + 5,12}$$

$$n = \frac{512}{6,12} = 83,44$$

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 83 responden (dibulatkan).

3.7 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan suatu catatan dari kumpulan fakta atau realita yang ada, dapat berupa kata, angka, maupun yang lainnya (Moleong, 2016:128) . Jenis-jenis data yang digunakan antara lain :

3.7.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti dari objek yang ditelitinya. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti menggunakan hasil, observasi, kuesioner, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi sendiri merupakan Teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengobservasi masyarakat di Kawasan hutan Desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Dengan mengunjungi tempat tersebut, peneliti dapat melihat kondisi konservasi hutan Gapoktanhut SHK Lestari dan kehidupan masyarakat di Kawasan hutan konservasi tersebut.

2. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang diberikan kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2014).

Kuesioner digunakan untuk melihat Gapoktanhut SHK Lestari melalui variabel-variabel seperti kebijakan, *Good Environmental Governance*, dan Kebutuhan & motivasi dalam pelaksanaan program perhutanan sosial yaitu berupa hutan kemasyarakatan. Dengan begitu, peneliti akan dengan mudah mengevaluasi dengan melihat hasil responden yang telah didapatkan.

3.7.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data tidak langsung yang diberikan berupa dokumen, arsip, dan catatan yang diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini data

sekundernya adalah berupa dokumen-dokumen yaitu catatan atau arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

Tabel 4. Data Dokumen Penelitian

No.	Dokumen
1.	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
2.	SK Perjanjian Kerjasama (PKS) antara UPTD KPHK Tahura WAR dengan SHK Lestari
3.	SK Persetujuan Kemitraan Konservasi antara UPTD KPHK Tahura WAR dengan SHK Lestari
4.	Rencana Pelaksanaan Program (RPP) Kelompok Tani Hutan SHK Lestari
5.	Rencana Kerja Tahunan (RKT)) Kelompok Tani Hutan SHK Lestari

Sumber : Diolah Peneliti Tahun 2023

3.8 Teknik Analisis Data

Peneliti menganalisis data yang diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan *software Microsoft Excel* dengan analisis deskriptif, dan kemudian data dianalisis dengan menggunakan Skala Likert dengan tabulasi. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, partisipasi, dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai kejadian atau gejala sosial.

a. Faktor Kebijakan

Faktor kebijakan dalam hal ini adalah bagaimana SHK ini dirancang, diimplementasikan, serta dievaluasi, yang mana berlandaskan dengan Permen No. 9 Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai landasannya. Dengan menurut Agus Subianto (Subianto, 2020:5)

telaah teori kebijakan publik, dapat dilihat dari 3 aspek yaitu perencanaan, implementasi atau pelaksanaan, dan evaluasi. Oleh karena itu untuk menilai suatu kebijakan dapat melihat dari ketiga indikator tersebut.

Tabel 5. Faktor Kebijakan

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Kebijakan atau Program	Perencanaan kebijakan atau program	1. kebijakan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan anggota dan kelestarian lingkungan	Likert
		2. peranan anggota SHK dalam perencanaan program	
		3. perencanaan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan	
	Pelaksanaan atau implementasi kebijakan	1. kebijakan atau program dilaksanakan sesuai dengan rencana	Likert
		2. Tahura berperan dalam membantu pelaksanaan	
		3. melakukan musyawarah antara Tahura, Walhi, dan Anggota SHK dalam menyelesaikan masalah.	
	Evaluasi kebijakan atau program	1. melakukan evaluasi rutin RPP dan RKT	Likert
		2. membuat laporan pertanggungjawaban terhadap program	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
		yang telah dicanangkan dalam RPP & RKT	
		3. Tahura dan Walhi mengadakan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program	

b. Faktor *Good Environmental Governance*

Good Environmental Governance atau yang disingkat GEG merupakan konsep kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan prinsip penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan lingkungan hidup demi keberlanjutan lingkungan hidup. Melalui konsep GEG, pelaksanaan kerjasama antara Tahura WAR dan juga Walhi Lampung selaku pembina Gapoktanhut SHK Lestari akan lebih terorganisasi. Maka perlu dengan menyamakan substansi dan tujuan melalui konsep GEG tersebut,

Tabel 6. Faktor *Good Environmental Governance*

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
<i>Good Environmental Governance</i>	Aturan Hukum	1. Terdapat hukum yang mengatur pengelolaan Gapoktanhut SHK Lestari 2. Disosialisasikannya hukum yang berlaku (Permen LHK No. 9 Th 2021) kepada anggota Gapoktanhut SHK Lestari dan Walhi Lampung oleh Tahura	Likert

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
		3. Anggota Gapoktanhut SHK Lestari, Walhi Lampung, dan Tahura telah mentaati hukum pengelolaan Perhutanan Sosial	
	Partisipasi & Representasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahura melakukan pengawasan (keuangan dan program) terhadap Gapoktanhut SHK Lestari 2. Tahura dan Walhi mengadakan evaluasi terhadap Gapoktanhut SHK Lestari 3. Walhi selaku pendamping menyampaikan aspirasi anggota Gapoktanhut SHK Lestari kepada Tahura 	Likert
	Akses terhadap informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Gapoktanhut SHK Lestari diberikan akses untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah tentang kemitraan konservasi 2. Walhi selaku pendamping diberikan informasi terbaru terkait 	Likert

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
		kemitraan konservasi oleh Tahura	
		3. Tahura selalu menyampaikan informasi terkait kebijakan dari pemerintah untuk Gapoktanhut SHK Lestari	
	Transparansi dan Akuntabilitas	1. Pengurus Gapoktanhut SHK Lestari selalu melaporkan secara rinci dalam pelaksanaan program Gapoktanhut SHK Lestari kepada Tahura dan Walhi	Likert
		2. Pengurus Gapoktanhut SHK Lestari membuat laporan keuangan dan menyampaikan kepada Tahura	
		3. Terdapat Rancangan Anggaran Belanja untuk melaksanakan program	
	Desentralisasi	1. Tahura mendapat kewenangan penuh dari pemerintah pusat untuk mengurus Gapoktanhut SHK Lestari	Likert
		2. Tahura tidak mendapatkan	

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
		tekanan dalam mengambil keputusan untuk Gapoktanhut SHK Lestari	
		3. Pengurus Gapoktanhut SHK Lestari tidak mendapatkan pengaruh dari pihak luar dalam mengambil keputusan	
	Lembaga dan Institusi	1. Tahura berperan besar dalam membantu mewujudkan tujuan Gapoktanhut SHK Lestari 2. Walhi berperan besar dalam membantu mewujudkan tujuan Gapoktanhut SHK Lestari 3. Adanya LSM Walhi membantu anggota Gapoktanhut SHK Lestari dalam membuat dan menjalankan program	Likert
	Akses untuk memperoleh Keadilan	1. Setiap anggota Gapoktanhut SHK Lestari diperlakukan dengan adil 2. Setiap anggota Gapoktanhut SHK	Likert

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
		Lestari diperjuangkan dalam mencapai keadilan haknya	
		3. Tahura & Walhi tidak membeda- bedakan perlakuan terhadap anggota Gapoktanhut SHK	
		Lestari	

c. Faktor Motivasi dan Kebutuhan

Teori motivasi oleh McClelland mengemukakan bahwa setiap orang dimotivasi oleh adanya kebutuhan dan keinginan akan kekuasaan (power), pencapaian (achievement), dan afiliasi (affiliation) yang mana tiap individu akan mendapatkan kombinasi dari ketiga motivasi tersebut dan memperlihatkan satu motivasi yang paling diinginkan. McClelland mendeskripsikan pencapaian, kekuasaan, dan afiliasi adalah kebutuhan penting yang dapat mendorong motivasi.

Tabel 7. Faktor Motivasi dan Kebutuhan

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Kebutuhan terhadap motivasi	Kebutuhan yang menjadi motivasi	1. Masyarakat perlu memenuhi kebutuhannya terutama kebutuhan fisiologis seperti makanan dan tempat tinggal 2. Adanya keinginan memenuhi kebutuhan dapat memotivasi dalam melaksanakan program	Likert

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
		Gapoktanhut SHK LESTARI	
		3. Anggota Gapoktanhut SHK LESTARI memiliki kemauan yang kuat dalam mencapai tujuan bersama	
		4. UPTD Tahura & Walhi termotivasi untuk mencapai tujuan dengan upaya memberdayakan anggota	
		5. Pengurus Gapoktanhut SHK LESTARI dengan baik	
		5. Pengurus Gapoktanhut SHK LESTARI telah bertanggung jawab dalam melaksanakan program	
		6. UPTD Tahura, dan Walhi telah bertanggung jawab membina Gapoktanhut SHK LESTARI	
		6. UPTD Tahura, dan Walhi telah bertanggung jawab membina Gapoktanhut SHK LESTARI untuk kemajuan bersama	

d. Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Sinergi Pengelolaan	Terlaksananya program	Program-program yang telah dicanangkan telah	Likert

Hutan Berbasis Masyarakat		terlaksana	
	Kerja sama yang baik	Kerjasama antara anggota Gapoktanhut SHK Lestari dan juga pembina yaitu UPTD Tahura dan Walhi telah berjalan dengan baik	Likert
	Menciptakan hasil yang baik	Gapoktanhut SHK Lestari telah menciptakan hasil yang baik sesuai dengan yang dicita-citakan	Likert

e. Evaluasi SHK Lestari

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Evaluasi SHK Lestari	Kinerja pelaksana kebijakan	Gapoktanhut SHK Lestari telah mencapai tujuan dari terbentuknya kemitraan konservasi yaitu melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat Kawasan hutan	Likert
	Selarasnya perencanaan dan implementasi	Pelaksanaan program telah berjalan selaras dengan perencanaannya	Likert
	Tercapainya tujuan	Kinerja semua aktor yang terlibat dalam Gapoktanhut SHK Lestari telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik	Likert

Penentuan skor dari setiap jawaban dalam skala Likert memiliki tingkat gradasi dari yang sangat negatif sampai sangat positif, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) : skor 4
2. Setuju (S) : skor 3
3. Tidak Setuju (TS) : skor 2
4. Sangat Tidak Setuju (STS) : skor 1

Peneliti melakukan analisis deskriptif dari tiap variabel dengan melihat nilai rata-rata (*mean*) dari skor hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Pengukuran pada variabel tersebut menggunakan skor 1 untuk terendah dan 4 untuk tertinggi. Sehingga interval skor tersebut adalah :

$$Interval = \frac{\text{Nilai Maksimal} - \text{Nilai Minimal}}{\text{Jumlah Kelas}}$$

$$Interval = \frac{4 - 1}{5} = 0,6$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka skala distribusi kriteria pendapat adalah sebagai berikut:

Sangat Rendah : 1.00 – 1.60

Rendah : 1.61 – 2.21

Cukup : 2.22 – 2.82

Tinggi : 2.83 – 3.43

Sangat Tinggi : 3.44 – 4.00

Peneliti dalam menganalisis data yang telah diperoleh melalui kuesioner akan dianalisis menggunakan *Partial Least Square* (SEM) yaitu analisis yang digunakan untuk mengembangkan atau memprediksi suatu teori yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan analisis model structural PLS

dengan menggunakan *software SmartPLS*. Dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap yaitu:

1. Analisa *Outer Model*

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas atau reabilitas model. Outer model dengan indikator reflektif di evaluasi melalui validitas convergent dan discriminant dari indikator pembentuk konstruk laten dan *composite reliability* serta cronbach's alpha untuk blok indikatornya (Ghozali & Latan, 2015).

Penjelasan lebih lanjut model pengukuran (*outer model*) dengan menggunakan uji *Convergent Validity*, *Discriminant Validity*, dan *Composit Reliability* adalah sebagai berikut:

- a. *Convergent validity*

Convergent validity dari *measurement model* dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor skor variabelnya. Indikator dianggap valid jika memiliki nilai AVE diatas 0,5 atau memperlihatkan seluruh *outer loading* dimensi variabel memiliki nilai loading > 0,5 (Abdullah, 2015). AVE adalah rerata presentase skor varian yang diekstrasi dari seperangkat variabel laten yang diestimasi melalui *loading standardlize* indikatornya dalam proses iterasi algoritma dalam PLS.

Penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran, nilai *loading factor* 0,5-0,6 masih dianggap cukup (Chin, 1998 dalam Ghozali dan Latan 2015). Selanjutnya (Ghozali & Latan, 2015) mengungkapkan validitas *convergent* berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur (*manifest variabel*) konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi tinggi.

b. *Discriminant validity*

Discriminant validity terjadi jika dua instrument yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi (Hartono, 2015). *Discriminant validity* dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruk. Menurut Ghazali dan Latan (2015), metode *discriminant validity* adalah dengan menguji validitas *discriminant* dengan indikator reflektif yaitu dengan melihat nilai *cross loading* untuk setiap variabel harus $>0,7$. Cara lain yang dapat digunakan yaitu dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik (Fornell dan Larcker 1981 dalam Ghazali dan Latan (2015).

c. *Composite Reliability*

Mengukur reliabilitas suatu konstruk dengan indikator reflektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Namun menggunakan *Cronbach's Alpha* untuk menguji reliabilitas konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (*under estimate*) sehingga lebih disarankan untuk menggunakan *Composite Reliability*. Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai *composite reliability*. *Composite reliability* adalah nilai batas yang diterima untuk tingkat reliabilitas komposisi (PC) adalah $>0,7$ (Abdullah, 2015).

2. Analisa *Inner Model*

Analisa inner model dikenal juga sebagai analisis strukturak model, yang bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variable laten (Ghozali & Latan, 2015). *Inner model*, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substantif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan bahwa variabel laten dan indikatornya atau *variabel manifest diskala zero means* dan unit varian sama dengan satu, sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dari model (Jaya, 2008).

a. *R-Square (R²)*

Dalam menilai struktural dimulai dengan melihat nilai *R-squares* untuk setiap nilai variabel endogen sebagai kekuatan prediksi dari model struktural. Perubahan nilai *R-squares* (R^2) dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel laten eksogen tertentu terhadap variabel laten endogen apakah memiliki pengaruh yang substantif. Nilai R^2 0.75, 0.50 dan 0,25 dapat disimpulkan bahwa model kuat, moderat dan lemah (Ghozali & Latan, 2015). Hasil dari PLS *R-squares* merepresentasikan jumlah *variance* dari konstruk yang dijelaskan oleh model (Ghozali & Latan, 2015). Semakin tinggi nilai R^2 berarti semakin baik model prediksi dan model penelitian yang diajukan.

b. Uji Hipotesis (*Bootstraping*)

Dalam menilai signifikasi pengaruh antar variabel, perlu dilakukan prosedur *bootstrapping*. Prosedur *bootstrap* menggunakan seluruh sampel asli untuk melakukan *resampling*. Hair et al. (2011) dan Henseler et al. (2009) menyarankan *number of bootstrap samples* sebesar 5.000 dengan catatan jumlah tersebut harus lebih besar dari

original sampel. Namun beberapa literatur (Chin, 2003; 2010) menyarankan *number of bootstrap samples* sebesar 200-1000 sudah cukup untuk mengoreksi *standar error estimate* PLS (Ghozali & Latan, 2015). Dalam metode *resampling bootstrap*, nilai signifikansi yang *digunakan (two-tailed) t-value* 1,65 (*significance level* = 10%), 1,96 (*significance level* = 5% dan 2,58 (*significance level* = 1%).

c. Analisis SEM dengan efek mediasi

Pengujian efek mediasi dalam analisis menggunakan PLS menggunakan prosedur yang dikembangkan oleh Baron dan Kenny (1998, dalam (Ghozali & Latan, 2015)) dengan tahapan sebagai berikut:

- Model pertama, menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen dan harus signifikan pada t-statistik > 1,96
- Model kedua, menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel mediasi dan harus signifikan pada t-statistik > 1,96
- Model ketiga, menguji secara simultan pengaruh variabel eksogen dan mediasi terhadap variabel endogen.

Pada pengujian tahap akhir, jika pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen tidak signifikan sedangkan pengaruh variabel mediasi terhadap variabel endogen signifikan pada t-statistik > 1,96, maka variabel mediasi terbukti memediasi pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen.

3. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk menjelaskan arah hubungan antara variabel endogen dan variabel eksogen. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian dan kerangka pemikiran yang telah dibahas mengenai Evaluasi Kemitraan Konservasi dan

Ketercapaian *Good Environmental Governance* Pada Gapoktanhut Sistem Hutan Kerakyatan Lestari, hipotesa penelitian ini diantaranya:

- H1 : Kebijakan berpengaruh terhadap Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan berpengaruh terhadap Evaluasi SHK Lestari
- H2 : *Good Environmental Governance* berpengaruh terhadap Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan berpengaruh terhadap Evaluasi SHK Lestari
- H3 : Motivasi dan Kebutuhan berpengaruh terhadap Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan berpengaruh terhadap Evaluasi SHK Lestari
- H4 : Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat berpengaruh terhadap Evaluasi SHK Lestari

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sistem Hutan Kerakyatan Lestari yang berada di desa Cilimus Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu bentuk kemitraan konservasi yang diwenangi oleh Tahura Wan Abdul Rachman dan didampingi oleh beberapa LSM salah satunya Walhi Lampung. SHK Lestari memiliki 512 anggota yang tergabung dari 21 Kelompok Tani Hutan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan SHK Lestari dan melihat ketercapain *Good Environmental Governance* dengan menyebarkan kuesioner pada aktor yang terlibat dalam SHK Lestari. Responden tersebut terdiri dari 76 Anggota SHK Lestari, 3 pegawai Tahura Wan Abdul Rachman, dan 5 Staf Walhi Lampung. Berdasarkan pada hasil penelitian, dapat disimpulkan:

Dari empat hipotesis penelitian, didapati bahwa :

1. Kebijakan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Evaluasi SHK Lestari.
2. *Good Environmental Governance* tidak berpengaruh terhadap Evaluasi SHK Lestari dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.

3. Motivasi & Kebutuhan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dan Evaluasi SHK Lestari.
4. Sinergi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Evaluasi SHK Lestari.

Penelitian ini mengungkapkan evaluasi SHK Lestari mendapat nilai rata-rata tinggi, terutama pada indikator perencanaan yang mendapat nilai sangat tinggi menyatakan bahwa tujuan dari SHK Lestari adalah untuk kepentingan anggota dan kelestarian lingkungan. Namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan seperti pengawasan terhadap program dan keuangan, dan juga perlu meningkatkan pelaksanaan program – program yang telah direncanakan.

Sedangkan untuk ketercapaian *Good Environmental Governance (GEG)* responden menilai cukup dan tinggi. Indikator aturan hukum mendapat nilai paling tinggi menyatakan bahwa anggota Gapoktanhut SHK Lestari, Walhi Lampung, dan Tahura telah mengetahui dan menaati hukum pengelolaan Perhutanan Sosial. Namun masih terdapat beberapa indikator yang dinilai hanya cukup yaitu partisipasi dan representasi mengenai pengawasan Tahura terhadap keuangan dan program Gapoktanhut SHK Lestari.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dengan beberapa pertimbangan memberikan saran dan rekomendasi yaitu bagi SHK Lestari dan juga untuk peneliti selanjutnya.

1. Saran Untuk SHK Lestari

Berdasarkan hasil penelitian perlu dilakukan perencanaan program yang lebih merinci dan tersusun baik secara pelaksanaan maupun rancangan anggaran belanja dan setelah program tersebut terlaksana dilakukan evaluasi per setiap program bersama dengan para pendamping. Selain itu perlu lebih dimasifkan evaluasi monitoring para pendamping terhadap keberlangsungan SHK Lestari.

2. Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan terbatas, oleh karena itu evaluasi dapat dilakukan dengan variabel lainnya agar penelitian ini lebih lengkap. Selain agar itu dapat dengan menambah responden dengan jangkauan yang lebih luas terlebih pada sektor pemerintahan, karena dalam hal ini pemerintah juga berperan besar dalam keberlangsungan dan kemajuan kemitraan konservasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. M. (2015). Living in the world that is fit for habitation: CCI's ecumenical and religious relationships. In *Aswaja Pressindo*.
- Addahlawi, H. A., Mustaghfiroh, U., Ni'mah, L. K., Sundusiyah, A., & Hidayatullah, A. F. (2020). Implementasi Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Indonesia. *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan*, 8(2), 106–118. <https://doi.org/10.21009/jgg.082.04>
- Agusti, T. M., Nurjaya, I. N., & Kuswahyono, I. (2020). Implementasi Regulasi Perhutanan Sosial yang Berkemanfaatan bagi Masyarakat Sekitar Hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. <https://doi.org/10.17977/um019v4i2p300-309>
- Akhmaddhian, S. (2013). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Hutan Konservasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Studi di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 449. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/250>
- Bari, A., & Randy Hidayat. (2022). Teori Hirarki Kebutuhan Maslow Terhadap Keputusan Pembelian Merek Gadget. *Jurnal Psikologi Sosial*, 20(2), iii–iv. <https://doi.org/10.7454/jps.2022.11>
- Dhaniswara, G. M., Adhitama, G. P., & Darmawan, R. (2023). Literature Review: Kontekstualisasi Pendekatan Kebutuhan Maslow dalam Studi Interior Hunian. *Jurnal Desain Interior*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.12962/j12345678.v8i1.16449>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. *BP Undip. Semarang*.
- Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi Perhutanan Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Restorasi Gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*. <https://doi.org/10.22146/jik.52442>
- Hartono, J. (2015). Konsep dan Aplikasi Structural Equation Modeling (SEM) Berbasis Varian dalam Penelitian Bisnis. *Public Administration Review*.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*.
- Mufidah, S. (2022). *Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Provinsi Lampung*.
- Mukhlis, M. (2021). *Kepemerintahan Lingkungan Untuk Pembangunan*

- Keberlanjutan* (P. D. W. A. Zakaria (ed.); Cetakan 1). Idea Press Yogyakarta.
- Nopyandri, N. (2016). Penerapan Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*.
- Prayitno, D. E. (2020). Kemitraan Konservasi Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i2.175>
- Raharjo, S. A. S., Hastanti, B. W., & Haryanti, N. (2020). Dinamika Kelembagaan Perhutanan Sosial di Wilayah Pehutani: Studi Kasus di KPH Telawa, Jawa Tengah. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. <https://doi.org/10.14710/politika.11.2.2020.183-197>
- Ridha, N. (2017). *PROSES PENELITIAN, MASALAH, VARIABEL DAN PARADIGMA PENELITIAN* Nikmatur Ridha. 14(1), 62–70.
- Safe'i, R., Kaskoyo, H., Darmawan, A., & Indriani, Y. (2020). Kajian Kesehatan Hutan dalam Pengelolaan Hutan Konservasi. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis*, 4(2), 70. <https://doi.org/10.32522/ujht.v4i2.4323>
- Salim, P. & U. Y. A. (2019). Pentingnya Need For Achievement, Need For Power Dan Need For Affiliation Individu Pada Suatu Organisasi. *Jurnal Manajemen Vol. 02 No. 02, 02*, 144.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. PT. Menuju Imsan Cemerlang.
- Sugiono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In *Alfabeta Bandung*.
- Tjahjono, W. S. (2021). *Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wisata Di Kawasan Hutan Lindung*. 22(1), 103–113.